



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005)

Menurut (Dr. Samsuar, 2019) Atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Teori Atribusi dapat menjelaskan bagaimana peneliti menentukan penyebab tentang perilaku atau kebiasaan perusahaan yang ada. Untuk menjelaskan kejadian-kejadian tertentu yang memberikan pengaruh terhadap kebiasaan perusahaan atau apa yang dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan.

2. Pengertian Auditing

Auditing atau audit adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis. Dimana pihak yang melakukan bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen serta catatan-catatan pembukuan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bukti pendukung. Tujuannya agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Menurut Arens, Elder dan Beasley dalam buku berjudul Auditing dan Jasa Assurance (2011:4) Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang independen yang kompeten. Pengertian audit diatas mempunyai beberapa unsur penting yaitu proses sistematis, mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif, asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan.

Orang yang melakukan tindakan audit disebut dengan auditor. Auditor dapat dibagi menjadi tiga jenis adalah auditor pemerintah, auditor internal, dan auditor independen (eksternal). Auditor pemerintah adalah auditor yang berkerja melakukan audit daripada keuangan Negara dan instansi-instansi pemerintah yang ada. Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan yang posisi seorang auditor ada dibawah pihak dan pengaruh suatu manajemen perusahaan. Sedangkan, auditor independen (eksternal) adalah auditor yang bekerja secara independen atau biasa menjadi akuntan publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik dan memberikan jasa profesinya dengan menggunakan cara mengaudit laporan keuangan yang telah diterbitrkan oleh perusahaan secara profesional. Ketiga klasifikasi ini memang terdapat perbedaan profesi dan kerja audit yang dilakukan tetapi ketiganya harus tetap menjaga independensi dan profesionalitas dalam menjalankan profesinya sebagai auditor.

Mendapatkan dan mengevaluasi bukti merupakan hal yang paling utama dalam pengauditan. Jenis bukti yang diperoleh dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti bisa berbeda-beda antara audit yang satu dengan yang lainnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semua audit berfokus pada proses mendapatkan dan mengevaluasi. Audit laporan keuangan bukti tentang tingkat kesesuaian dengan asersi dalam laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung. Bukti yang diperoleh wajib diinterpretasikan dan dinilai supaya auditor bisa menciptakan pertimbangan akuntansi yang biasanya diharapkan sebelum sampai pada konklusi bahwa asersi-aseri sudah dengan kriteria yang obyektif.

Tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan merupakan segala sesuatu yang dilakukan selama audit dilaksanakan memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk merumuskan pendapat audit mengenai asersi-aseri tentang tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian ekonomi yang telah diaudit. Opini auditor akan menjelaskan seberapa jauh asersi-aseri sesuai dengan kriteria atau standar yang sudah ada. Hasil akhir berdasarkan segala macam audit adalah laporan yang berisi informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan tentang tingkat kesesuaian asersi yang dibuat oleh klien menggunakan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan untuk mengevaluasi.

3. Jenis-Jenis Audit

a) Audit Laporan Keuangan

Menurut William F. Meisser, Jr dari buku *Auditing and Assurance Service, A System Approach* (2008) Pada pengertian audit yaitu proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Audit laporan keuangan merupakan penilaian atas suatu perusahaan atau badan hukum lainnya sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar.

Audit laporan keuangan ini auditor menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar prinsip-prinsip akuntansi umum. Hasil audit laporan keuangan disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan-laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada pihak-pihak berkepentingan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b) Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam membuat kriteria. Audit kepatuhan umumnya dilakukan dilingkungan pemerintahan.

c) Audit Operasional

Audit operasional adalah audit yang merupakan review sistematis dari kegiatan organisasi atau bagian daripadanya, yang kegiatan organisasi tersebut berhubungan dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk :

- 1) Mengevaluasi keefektifan dan efisiensi kinerja.
- 2) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
- 3) Menguji prosedur verifikasi internal untuk duplikasi faktur untuk bukti

Pihak yang memerlukan audit operasional adalah pihak manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakan audit tersebut.



4. Opini Audit

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2006) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Opini audit adalah laporan yang diberikan oleh akuntan publik yang terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas wajarnya laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Auditor dapat memilih tipe pendapat yang akan dinyatakan atas laporan keuangan auditnya. Auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (IAPI, 2012) SA Seksi 705 membagi ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu:

a) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat audit sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing yang ada, auditor tersebut tidak menemukan adanya kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau juga tidak terdapat penyimpangan dari adanya prinsip akuntansi yang berlaku (SAK).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified unqualified Opinion*)
- Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap adanya pendapat wajar
- c) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
- Opini Wajar Dengan Pengecualian adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan keuangan dikatakan wajar didalam hal yang material, namun tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau juga kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dilakukan pengecualian.
- d) Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
- Opini Tidak Wajar adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan secara keseluruhan itu bisa terjadi jika auditor harus memberi tambahan suatu paragraf untuk dapat menjelaskan ketidakwajaran atas suatu laporan keuangan, yang disertai dengan dampak dari akibat adanya ketidakwajaran tersebut, pada suatu laporan auditnya.
- e) Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)
- Opini Tidak Memberikan Pendapat adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan suatu pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Pembuatan laporannya auditor tersebut harus memberi penjelasan mengenai pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tersebut tidak memberi pendapat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Kantor Akuntan Publik

Awal terbentuknya Kantor Akuntan Publik. Sebelum perang dunia 1, masalah yang paling mendesak dimulai dari Amerika Serikat adalah mengembalikan kredibilitas penilaian neraca menurut (Previts, Gary & Merino, Barbara. 1998). Pada saat itu, perusahaan enggan berbagi data keuangannya. Robert H. Montgomery, salah satu pelopor profesi auditing, memaparkan kesulitan yang dihadapi praktisi dalam mencari informasi dari perusahaan. Tidak adanya data kertas ini bertepatan dengan periode ketidakstabilan ekonomi yang menjadi berulang-ulang.

Profesi yang baru lahir telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam sekitar dekade terakhir abad kesembilan belas, tetapi jalannya masih panjang. Selama tahun-tahun awal abad kedua puluh, tuntutan untuk pengawasan yang lebih besar atas dunia bisnis yang sedang berkembang menghasilkan pembentukan badan pengatur federal pertama, termasuk Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian, Komisi Perdagangan Federal, dan Dewan Cadangan Federal. Namun, banyak perusahaan masih melihat sedikit alasan untuk mempekerjakan akuntan luar.

Perusahaan-perusahaan awal berjuang untuk meyakinkan mereka sebaliknya.

“Keuntungan memiliki layanan semacam itu yang dilakukan oleh perusahaan yang independen, bertanggung jawab, dan dilengkapi dengan baik dengan posisi keuangan dan komersial yang diakui harus terlihat jelas. Sampai terbentuknya Kantor Akuntan Publik.

KAP Menurut SK. Menkeu No.43/KMK.017/1007 tanggal 27 januari 1997 Praktek akuntan di Indonesia di mulai sejak jaman VOC 1642. Akuntan- akuntan Belanda itu kemudian mendominasi akuntan di perusahaan-perusahaan yang dimonopoli penjajah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hingga abad 19. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan akuntansi hanya diselenggarakan oleh Departemen Keuangan berupa kursus akuntansi di Jakarta. Pesertanya pada saat itu 30 orang termasuk Prof. Soemardjo dan Prof. Hadibroto. Bersama empat akuntan lulusan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan enam lulusan Belanda, Prof. Soemardjo merintis Ikatan Akuntan Indonesia IAI tanggal 23 Desember 1957.

Menurut Peraturan (Menteri Keuangan, 2008) No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik, Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan ijin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Kantor Akuntan Publik memberikan berbagai macam jasa bagi masyarakat. Penggolongan jasa tersebut dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Jasa Assurance

Jasa *Assurance* adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi yang diperlukan bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengambil keputusan mencari jasa *assurance* untuk meningkatkan mutu yang dijadikan sebagai basis keputusan yang akan mereka lakukan.

2. Jasa Atestasi

Jasa atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atas pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam segala hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Jasa *Nonassurance*

Jasa *nonassurance* merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya auditor tidak memberikan pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau temuan lainnya. Jasa *nonassurance* terdiri dari jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi.

Bentuk badan usaha KAP dapat terbentuk:

- a) Perseorangan: hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan publik yang juga sekaligus bertindak sebagai pimpinan.
- b) Persekutuan perdata atau persekutuan firma: hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 orang akuntan publik dan atau 75% dari seluruh sekutu adalah akuntan publik. Masing-masing sekutu disebut rekan dan salah seorang rekan bertindak sebagai pimpinan KAP.

D. Sistem Pengendalian Mutu KAP

Menurut (Rudy, Prihantoro. 2013) Pengendalian mutu adalah suatu sistem kendali yang efektif untuk mengkoordinasikan usaha – usaha penjagaan kualitas, dan sehingga diperoleh suatu produksi yang sangat ekonomis serta dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengekangan; pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya); kualitas.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengendalian mutu adalah proses pemeriksaan data yang bertujuan mengawasi mutu suatu produk buatan yang dihasilkan secara besar-besaran. Pengendalian mutu berasal dari kata dasar pengendalian. Sistem pengendalian mutu berguna untuk meningkatkan produk atau jasa yang dibuat untuk menjaga kualitas dan mendapatkan hasil yang baik.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2013) Kantor Akuntan Publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal terkait dengan implementasi secara efektif sistem tersebut. Pengendalian mutu Kantor Akuntan publik harus diterapkan oleh setiap Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit, atestasi, akuntansi, *review*, dan konsultasi yang standarnya telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesionalnya bertanggung jawab mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik dalam pemenuhan tanggung jawab wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam memnentukan hubungan profesionalnya, bahwa Kantor Akuntan Publik dan staf Kantor Akuntan Publik akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh kode etik.

Menurut (Evans & Lindsay, 2008) Kantor Akuntan Publik kompeten secara profesional, obyektif, dan menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

Kantor Akuntan Publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan standar profesi akuntan publik. Menurut arens dalam buku auditing dan jasa assurance prosedur kendali mutu dari 150 firma internasional dengan banyak klien multinasional yang kompleks harus sangat berbeda dari prosedur pengawasan mutu lima orang yang mengkhususkan diri dalam audit yang kecil di satu atau dua industri. Menurut (Smith, 1993) Kualitas adalah kebaikan atau kesempurnaan sesuatu. Itu dinilai terhadap diterima standar kelayakan untuk hal-hal semacam itu dan bertentangan dengan kepentingan pengguna dan lainnya pemangku kepentingan. Menurut (Reeves & Bednar, 1994) Konstruksi kualitas ruang begitu luas dan mencakup begitu banyak komponen yang bakal ada utilitas kecil dalam model apa pun yang mencoba mencakup semuanya, termasuk kualitas kontrol.

1. Penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu

Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2013) kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik tergantung pada berbagai faktor antara lain ukuran Kantor Akuntan Publik, tingkat otonomi yang diberikan kepada stafnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat oraktik, organisasi kantornya, dan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Kantor Akuntan Publik wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu yang dibahas berikut ini, sejauh yang diterapkan dalam praktiknya, penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Unsur unsur pengendalian mutu berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, praktik pemekerjaan Kantor Akuntan Publik memengaruhi kebijakan pelatihan. Praktik pelatihan memengaruhi kebijakan supervisi. Praktik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



supervisi memengaruhi kebijakan pelatihan dan promosi. Kantor Akuntan Publik wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai :

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- a) Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradiredja, 2002:26). Dalam Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2011) yang diterbitkan oleh (Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2007) menyatakan bahwa: “auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan didalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.”
- b) Penugasan Personel menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) merupakan suatu kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai personel. Kebijakan dan proseduri ini digunakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut.
- c) Konsultasi menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) merupakan suatu kebijakan atau dialog yang memberikan keyakinan bahwa personel memperoleh informasi yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, dan pertimbangan (*judgement*) yang memadai.
- d) Supervisi menurut (PSA No 05, 2011) dalam SA seksi 311. Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Selain itu, supervisi menurut Standar Profesional Akuntan Publik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(SPAP, 2011) merupakan suatu kebijakan yang memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik. Lingkup supervisi dan *review* yang sesuai pada suatu kondisi tertentu, tergantung atas beberapa faktor, antar lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan. Tanggung jawab Kantor Akuntan Publik untuk menetapkan prosedur mengenai supervisi berbeda dengan tanggung jawab staf secara individual untuk merencanakan dan melakukan supervisi secara memadai atas perikatan tertentu.

e) Pemekeraan (*hiring*) menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) merupakan kebijakan yang dibuat Kantor Akuntan Publik untuk memberikan keyakinan bahwa karyawan yang dipekerjakan mempunyai pengetahuan, dan karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten. Akhirnya, mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik tergantung kepada integritas, kompetensi, dan motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan supervisi atas pekerjaan. Oleh karena itu, program pemekeraan Kantor Akuntan Publik menjadi salah satu unsur penentu untuk mempertahankan mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik.

2. Penetapan Tanggung Jawab

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) Kantor Akuntan Publik dapat menetapkan tanggung jawab kepada personelnnya, agar dapat melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya secara efektif. Hal-hal yang harus dipertimbangkan sepenuhnya saat memberikan tanggung jawab adalah kemampuan pribadi, pemberian wewenang dan ruang lingkup pengawasan yang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disediakan. Menurut (Garvin, 1984) tingkatan masing-masing manajemen harus bertanggung jawab dan fokus terhadap pengendalian kontrol masing-masing pada tingkatannya

3. Komunikasi

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) Kantor Akuntan Publik wajib mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu kepada personelnnya dengan suatu cara yang akan memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur tersebut dapat dipahami. Bentuk dan lingkup komunikasi tersebut harus cukup komprehensif sehingga komunikasi tersebut dapat mentampaikan kepada personel Kantor Akuntan Publik informasi mengenai kebijakan dan prosedur pengendalian yang berhubungan dengan mereka. Pada umumnya komunikasi akan lebih baik apabila dilakukan secara tertulis. Namun, efektivitas sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik tidak dipengaruhi oleh tidak adanya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu tertulis yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik.

Ketika menentukan apakah dokumen tentang kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas diperlukan, skala, struktur dan sifat bisnis Kantor Akuntan Publik harus dipertimbangkan, dan jika perlu, dokumen tersebut harus diterapkan secara ekstensif. Umumnya, dokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik besar akan lebih ekstensif dibanding dengan Kantor Akuntan Publik kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pemantauan

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) Kantor Akuntan Publik diharuskan memantau efektivitas sistem pengendalian mutu dengan cara mengevaluasi secara rutin kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya, penetapan tanggung jawab, dan komunikasi kebijakan dan prosedurnya. Ukuran, struktur, dan sifat praktir Kantor Akuntan Publik memengaruhi keterbatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh fungsi pemantauan Kantor Akuntan Publik. Fungsi pemantauan menyiratkan perubahan reguler pada kebijakan dan prosedur, penugasan tanggung jawab, dan bentuk dan ruang lingkup komunikasi. Karena perubahan keadaan, seperti perluasan ruang lingkup bisnis atau pembukaan kantor baru, penggabungan kantor akuntan publik atau akuisisi bisnis. Kegiatan pemantauan meliputi pemeriksaan yang merupakan salah satu unsur pengendalian mutu..

5. Perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011). Sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, sebagaimana dijelaskan dalam SPM seksi 100 (PSPM No.1) sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan publik mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penetapan tanggung jawab, komunikasi, dan pemantauan. Seksi ini memberikan pedoman dalam perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.

Kantor Akuntan Publik dituntut untuk mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu sejauh unsur pengendalian mutu tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya, dalam merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Beberapa elemen kendali mutu saling terkait. Oleh karena itu, praktik perekrutan Kantor Akuntan Publik akan mempengaruhi kebijakan pelatihannya. Praktik pelatihan staf kantor akuntan akan mempengaruhi kebijakan promosi. Praktik perekrutan dan promosi ini akan memengaruhi kebijakan regulasi. Sebaliknya, praktik supervisi berdampak pada kebijakan pelatihan dan promosi.

Kantor Akuntan Publik juga harus mempertimbangkan perumusan kebijakan di bidang yang diidentifikasi pada setiap elemen pengendalian mutu pada bagian ini, sehingga kebijakan tersebut juga dapat diterapkan dalam praktik. Bagian ini juga memberikan beberapa contoh yang menguraikan proses yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan Prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik tidak harus mencakup semua contoh tersebut atau juga tidak harus dibatasi hanya pada contoh tersebut.

Suatu Kantor Akuntan Publik bergabung (*merger*) dengan atau mengakuisisi praktik Kantor Akuntan Publik lain, Kantor Akuntan Publik gabungan tersebut harus memberikan perhatian khusus kepada aspek pengendalian mutunya. Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu dari Kantor Akuntan Bersama harus dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur tersebut masih dapat diterapkan pada perubahan kondisi lingkungan. Perhatian khusus tersebut juga harus diberikan kepada aspek pengendalian mutu apabila Kantor Akuntan Publik berpisah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya terori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Maya Grace Basaria	Analisis penerapan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik dengan standar pengendalian mutu 1, standar audit 220, standar audit 240 (2017)	Dependen : Sistem Pengendalian Mutu	Sistem Pengendalian Mutu sudah dijalankan dengan baik.
2	Saputra, Rio Angga	Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit Di Kantor Akuntan Publik Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan di Surabaya (2017)	Dependen : Sistem Pengendalian Mutu	Sistem Pengendalian Mutu di KAP Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan di Surabaya sudah sesuai dengan standar yang ada.
3	Anggi Maisandi	Analisis Penerapan Pengendalian Mutu Audit Berdasarkan SPAP (Studi Kasus pada KAP Arhj) (2019)	Dependen : Sistem Pengendalian Mutu	Penerapan sistem pengendalian mutu di KAP sudah baik
4	Vika Velika Hakim, Ratna Nurhayati.	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Mutu pada Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji, dan Rekan Yogyakarta	Dependen ; Unsur Sistem Pengendalian Mutu	SPM yang diterapkan belum sesuai dengan standar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5	Siti Nur Halimah	Analisis sistem pengendalian mutu pada kantor akuntan publik bharata, arifin, mumajad, & sayuti.	Dependen : Sistem Pengendalian Mutu KAP	Pengendalian mutu sudah berjalan dengan baik
6	Indra Purnama	Pengaruh Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu di KAP (2020)	Dependen : Sistem Pengendalian mutu	Sistem pengendalian mutu berpengaruh signifikan.
7	Aty Suryati	Peranan Standar Pengendalian Mutu KAP dalam meningkatkan profesionalisme Akuntan Publik (2019)	Dependen : Standar Pengendalian Mutu Independen : Profesionalisme Akuntan Publik	Adanya peran standar pengendalian mutu terhadap Profesionalisme akuntan publik
8	Bambang H, Zaki Baridwan	The effect of quality control system on audit quality (2020)	Dependen : Effect of quality control system Independen : Audit Quality	Etika dan independensi memengaruhi kualitas audit.
9	Anjelia, Reni	The implementation of independence and client acceptance of quality control in public accounting firm (2016)	Dependen : Independence and client acceptance Independen : Quality control public accounting firm	KAP tidak 100% yakin terhadap independensi dan penerimaan klien
10	Blasius Febriyanto, Trisno Saputro, Dwi Asih Surjandari	The influence of application system quality control in the performance of auditors (empirical studies) abc kap in south jakarta in 2009 – 2013 (2016)	Dependen : Quality Control System Independen : Auditor Performance	independensi, profesionalisme dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor

1. Ditaring memutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



11	Listya Yuniastuti R, Sukrisno Agoes	Influence of Auditor Independence, Audit Tenure, and Audit Fee on Audit Quality of Members of Capital Market Accountant Forum in Indonesia (2014)	Dependen : Independence, audit tenure, audit fee Independen : Audit Quality	bahwa kualitas audit dapat dijelaskan oleh variasi independensi auditor, masa kerja audit, dan fee audit
12	Rachmanandra Nuroni Arvianty, Mathius Tandiontong	The Effect of Competence, Independence, and Size of Public Accounting Firms on Audit Quality (2020)	Dependen : Competence, independence, size of public accounting firm Independen : Audit Quality	kompetensi auditor independensi serta ukuran Kantor Akuntan Publik yang mempengaruhi kualitas audit.

F. Kerangka Pemikiran

1. Independensi Auditor terhadap Kantor Akuntan Publik

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pimpinan dalam instansi, namun juga kepada masyarakat dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan auditor tersebut. Sikap mental independen tersebut meliputi independen tersebut meliputi independen dalam fakta maupun independen dalam penampilan.

Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan uditee

Hak Cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang menutup sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dapat menimbulkan kecuraaigaan bahwa auditor tersebut akan memihak atau tidak independen. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus bersikap bebas menurut faktanya, tapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasannya.

2. Pemekerjaan di Kantor Akuntan Publik

Pemekerjaan adalah salah satu unsur dari Sistem Pengendalian mutu yang harus dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik untuk meningkatkan hasil audit yang dihasilkan. *Staff* yang di rekrut harus sesuai dengan standar yang ada untuk mempertahankan kualitas dari karyawan dan jasa-jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, auditor yang di *hire* harus sesuai dengan standar yang ada untuk menghindari kualitas yang kurang baik dari hasil audit.

3. Pengembangan Profesional terhadap Kantor Akuntan Publik

Pengembangan profesional juga salah satu dari unsur sistem pengendalian mutu yang harus dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik. Auditor harus dikembangkan pengetahuannya dan *update* terbaru dari seminar-seminar yang ada. Untuk membuat hasil audit yang semakin meyakinkan.

Pengembangan profesional dilakukan untuk pengembangan karier dari setiap karyawan yang bekerja dan dapat menilai pada apa yang telah dikerjakannya. Kebutuhan pengembangan profesional didasari oleh pemikiran jangka panjang untuk setiap *staff* yang ada. Untuk menambah pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Teori Atribusi

- © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- Teori atribusi membantu peneliti dalam membuat hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian SPM adalah untuk memperhatikan apakah pengendalian mutu yang dilaksanakan sudah dijalankan dengan baik. Lalu kebijakan apa yang sudah dibuat oleh Kantor Akuntan Publik. Teori atribusi juga membantu untuk menjelaskan bagaimana prosedur yang sudah dibuat dalam penerapan sistem pengendalian mutu dalam Kantor Akuntan Publik, dan juga menambahkan bukti-bukti berupa dokumen yang ada yang dapat memperkuat penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

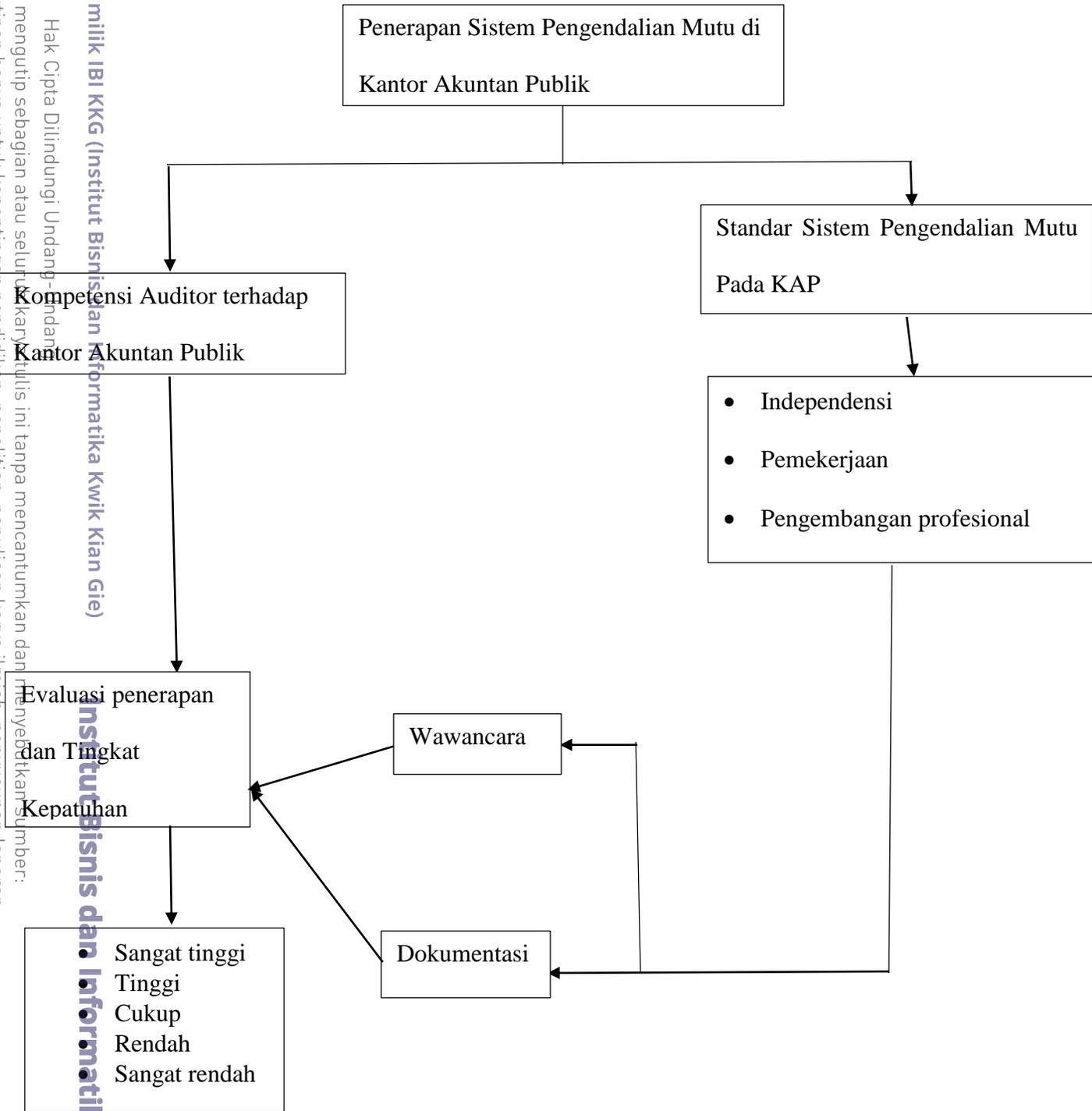
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

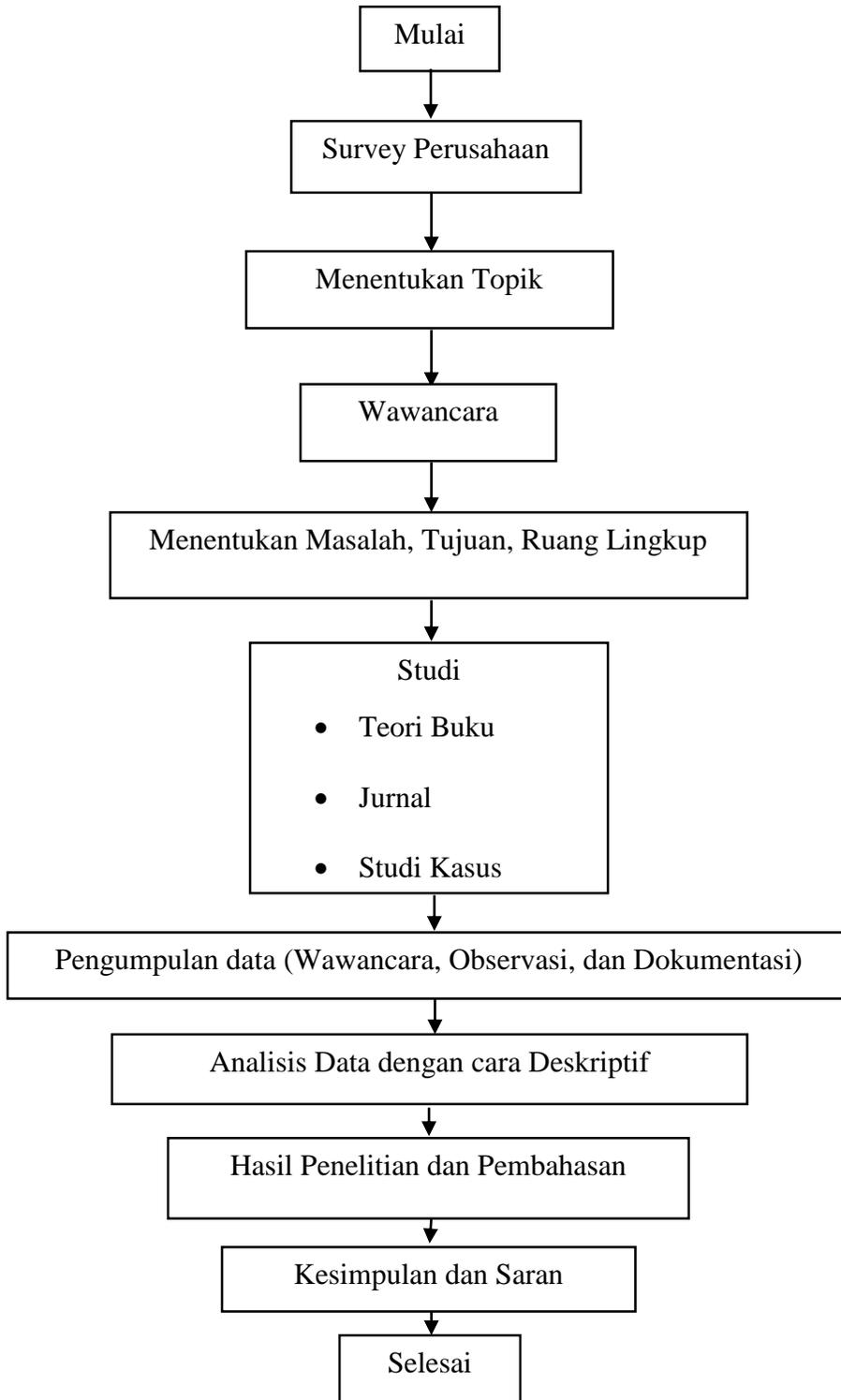
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Diagram Alir Penelitian



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

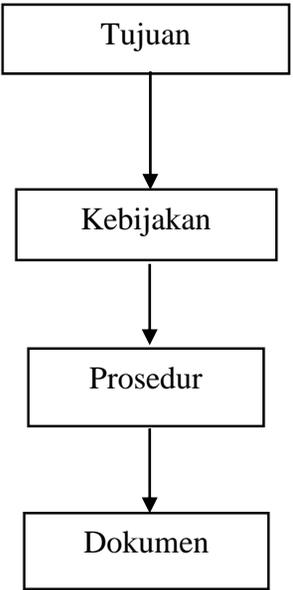
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.3
Teori Atribusi



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.